

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi dipahami tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik yang lebih luas cakupannya, pemahaman demokrasi sebagai sistem politik menunjukkan kebijakan umum ditentukan dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik untuk menjamin kebebasan politik (Rahayu, 2007). Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak (www.bbc.co.uk, 2012). Berikut adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Almadudi, yaitu: (Abdulkarim, 2001)

- 1) Kedaulatan rakyat.
- 2) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- 3) Kekuasaan mayoritas

- 4) Hak-hak mayoritas.
- 5) Jaminan hak asasi manusia.
- 6) Pemilihan yang bebas dan jujur.
- 7) Persamaan di depan hukum.
- 8) Proses hukum yang wajar.
- 9) Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
- 10) Pluralisme social, ekonomi, dan politik.
- 11) Nilai-nilai toleransi, pragmatism, kerja sama, dan mufakat.

Maka dari itu, negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Negara-negara yang menganut prinsip demokrasi antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Rusia, India, Libya, Malaysia dan masih banyak lagi Negara lainnya. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Demokrasi memiliki banyak tipe, hal itu disesuaikan dengan kondisi pemerintahan pada suatu negara. Maka dari itu penerapan demokrasi pada tiap negara pastinya berbeda. Bentuk sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi pancasila yaitu menurut Prof. Dr. Hazairin, SH, deemokrasi pancasila adalah demokrasi sebagaimana telah dipraktekan oleh bangsa Indonesia sejak dajulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam kehidupan masyarakat hukum adat, seperti desa, kerja, marga, nagari, dan wanua (Sumarsono, 2001).

Sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada banyak sarana yang dapat rakyat gunakan sebagai bentuk dari demokrasi, salah satu sarana itu adalah pemilihan umum, pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintah dari berbagai sudut pandang, banyak pengertian mengenai pemilihan umum. Tetapi intinya adalah pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan Negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah “untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka” (www.wartawarga.gunadarma.ac.id, 2012).

Sebagai contohnya pemilihan umum di Amerika Serikat, pemilihan umum di Amerika Serikat, rakyat tidak langsung memilih Calon Presiden secara langsung melainkan pada saat pemilihan Rakyat Amerika Serikat memilih anggota dewan yang berjanji akan memilih calon presiden tertentu, dewan pemilih presiden disebut *electoral collage*. Dewan pemilih ini berjumlah 538 orang, dan mewakili 50 negara bagian AS. Untuk menjadi presiden AS, seorang kandidat harus memenangkan 270 suara anggota *electoral collage*. Kalau tidak mencapai suara minimal, otomatis kandidat calon presiden kalah (www.politik.kompasiana.com, 2012).

Di Indonesia sendiri juga memiliki tata cara tersendiri dalam menjalankan pemilihan umum dimana pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2004 dan 2009 telah mengalami perubahan dari pemilihan umum terdahulu yang telah berlangsung sejak tahun 1955-1999. Pada tahun 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, saat itu diputuskan Ir. Soekarno sebagai presiden dan M. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia (Tugiyono, 2004). Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya terbuka sebuah kesempatan untuk mendirikan partai politik mengingat saat penjajahan masa Jepang semua kegiatan partai politik dilarang. Pada pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa Orde lama atau lebih dikenal sebagai masa kepemimpinan Ir. Soekarno partai politik di Indonesia hanya berjumlah empat partai. Pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer, pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR dan untuk memilih anggota dewan konstituante (www.kpu.go.id, 2012). Setelah itu Indonesia memasuki masa orde baru yang dilatar belakangi dengan runtuhnya orde lama dimana ada peralihan kepemimpinan dan presiden Soekarno kepada jendral Soeharto. Pemilihan umum 1971 merupakan pemilihan umum kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan Soeharto berkuasa. Pemilihan umum ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, dimana anggota DPR yang terpilih nanti yang akan memilih presiden. pada saat orde baru terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik sehingga partai pada masa orde baru hanya berjumlah tiga partai (Dhakidae, 2003). Selama orde baru telah berhasil melaksanakan pemilihan

umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali yaitu dari tahun 1971 sampai dengan 1997. Perubahan mulai terjadi pada pemilihan umum 1999, karena peserta pemilihan umum tahun 1999 mengalami peningkatan dari sebelumnya berjumlah tiga partai menjadi 48 partai politik, meskipun pada pemilihan umum 1999 rakyat hanya memilih anggota DPR saja setelah itu anggota DPR yang terpilih baru memilih presiden. Pemilihan umum 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilihan umum-pemilihan umum sebelumnya karena pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2009 jumlah partai peserta pemilihan umum sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Kemenangan partai pada saat pemilihan umum akan menentukan bakal calon presiden yang akan diusung oleh partai yang lolos pemilihan umum legislatif dan kemudian rakyat sendiri yang akan memilih calon presiden Indonesia (www.kpu.go.id, 2012).

Sebagai sarana dari demokrasi, pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat Indonesia membuat para calon presiden peserta pemilihan umum harus berkampanye (SCRIBD, 2012). Tujuan dari kampanye adalah mengenalkan kepada masyarakat terhadap para calon pemimpin bangsa serta visi dan misi para calon presiden mengenai memimpin bangsa Indonesia. Menurut definisinya kampanye adalah suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu

(Rogers & Storey, 1987). Dan dengan adanya kampanye presiden, masyarakat dapat mengambil sebuah keputusan tentang faktor apa yang menentukan mereka dalam hal memilih presiden. Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengenai pengertian pengambilan keputusan ialah:

“Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak-adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat”

Dan suatu pengambilan keputusan juga didukung faktor-faktor yang menyebabkan keputusan itu diambil, Bagaimana seorang calon presiden mempromosikan dirinya sehingga munculah respon dari para masyarakat dalam bentuk pengambilan keputusan.

Peubahan sistem pemilihan umum di Indonesia bermula saat terjadinya reformasi. Definisi dari reformasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Hal ini dipicu dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang digerakan oleh para mahasiswa atau lebih dikenal dengan sebutan Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998. Karena hal itulah mahasiswa dianggap sebagai pahlawan reformasi. Karena gerakan ini menjadi monumental karena berhasil memaksa presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden RI yang telah ia jabat selama 32 tahun dan jabatan presiden diambil alih oleh B.J Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 juga mencuatkan tragedi Trisakti yang menewaskan empat orang mahasiswa (Widjojo, 2004). Semenjak itulah Indonesia mulai mengalami perubahan sehingga akhirnya

melahirkan UU no. 42 tahun 2008 menyebutkan “Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (www.MahkamahAgung.go.id, 2012).

1.2 Identifikasi Masalah

Bertambahnya jumlah partai politik pascaruntuhnya orde baru mengakibatkan banyak pilihan yang akan dihadapkan oleh masyarakat, tetapi masyarakat hanya akan memilih satu partai saat pemilihan legislatif dimana partai yang dipilih akan mewakili pencalon presiden saat pemilihan umum residen. Dengan banyaknya pilihan partai dan calon membuat masyarakat memiliki cara tersendiri sesuai dengan *field of experience* masing-masing individu untuk memilih mana yang sesuai dengan keinginan para masyarakat. Setiap kalangan di Indonesia memilih berdasarkan faktor-faktor yang berbeda. Setiap lapisan masyarakat juga harus diberikan pendekatan yang berbeda sesuai dengan latar belakang mereka agar pesan yang disampaikan kepada para komunikan tepat sasaran dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai pemahaman tentang faktor apa yang dibutuhkan pada diri seseorang sehingga orang itulah yang mereka pilih sebagai presiden.

Menurut *Elaboration Likelihood Model* ada dua tipe rute oleh seseorang dalam mengambil keputusan, penjelasan ini didasarkan pada dua psikolog bernama Petty dan Cacioppo, yaitu: (Shim, 2003)

1) *Central Route*

Ketika *Central Route* aktif penerima akan mendengar, melihat, atau membaca mengenai atribut dan manfaat sebuah merk namun tidak berarti akan menerimanya begitu saja. Karena masyarakat termotivasi untuk memperoleh informasi mengenai kategori dari sebuah produk. Masyarakat akan menerima sebagian argumen namun memberikan argumen penolak atas sebagian lainnya.

2) *Peripheral Route*

Ketika masyarakat tidak termotivasi untuk menangkap dan memahami argumen pesan, maka ia dapat menangkap ciri-ciri periphal dari pesan tersebut. Sinyal periphal melibatkan elemen-elemen yang tidak berhubungan dari sebuah pesan. Setelah menangkap sinyal periphal, masyarakat dapat memiliki pemikiran atau emosi sebagai respon dari sinyal tersebut.

Dengan mengetahui rute apa yang dimiliki seseorang hal ini akan berlaku untuk kepentingan pemilihan umum agar pesan yang disampaikan tepat sasaran sesuai dengan target *audience*. Orang yang memiliki *central route* memilih seorang presiden berdasarkan faktor utama yang dimiliki individu yang mencalonkan sebagai presiden contohnya seperti prestasi apa yang pernah di raih, gelar pendidikan, kiprah

di bidang politik, dan lain-lain. Sedangkan orang yang memiliki *peripheral route* memilih seorang presiden berdasarkan faktor pendukung yang dimiliki individu yang mencalonkan sebagai presiden contohnya fisik yang tampan, pembawaan yang tenang, menggunakan artis untuk muncul pada saat kampanye, sering beriklan di televisi, dan lain-lain sebagainya. Untuk memudahkan menggolongkan sebuah faktor dan membedakannya untuk digolongkan menjadi *central route* atau *peripheral route* adalah dengan cara adanya emosi yang terlibat oleh komunikan saat dia menerima pesan. Jika ada unsur emosi yang dilibatkan artinya faktor tersebut masuk kedalam golongan *peripheral route*.

Seperti yang disebutkan oleh peneliti sebelumnya peran mahasiswa dalam sejarah membawa Indonesia pada perubahan sangatlah besar. Mengetahui rute pengambilan keputusan seorang mahasiswa sangat penting untuk kepentingan kampanye, hal ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan pendekatan seperti apa yang calon presiden lakukan jika target audience mereka adalah mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa menjadi target audience yang penting untuk kepentingan pemilihan umum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1) “Faktor-faktor yang menentukan pengambilan keputusan Mahasiswa di JABODETABEK dalam memilih presiden?”

- 2) “Rute apa yang digunakan mahasiswa di JABODETABEK dalam mengambil keputusan memilih presiden?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa di JABODETABEK dalam memilih presiden.
- 2) Untuk mengetahui rute pengambilan keputusan mahasiswa di JABODETABEK dalam memilih presiden.

1.5 Kegunaan Penelitian.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan *Elaboration Likelihood Model* dalam pemilihan umum di Indonesia dengan menggunakan mahasiswa sebagai objek penelitian.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini akan menghasilkan sebuah pengetahuan mengenai rute pengambilan keputusan yang dimiliki oleh mahasiswa. Maka dengan mengetahui rute tersebut dapat berguna untuk menyeleksi strategi yang tepat yang dapat dilakukan untuk kepentingan pemilihan umum agar pesan yang disampaikan tepat sasaran.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Model ini dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kampanye secara skala besar dalam menentukan strategi yang akan dilakukan terhadap audience yang berbeda.

1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bagian sebagai berikut :

1.6.1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang yang mendasari penelitian ini, kemudian identifikasi masalah yang akan dianalisis lebih lanjut, rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini

1.6.2. Bab II Objek Penelitian

Bab ini berisi pemaparan mengenai profil universitas terpilih yang akan diwawancarai mahasiswa nya.

1.6.3. Bab III Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai sejarah pemilu di Indonesia serta perkembangannya, Kampanye, sikap, dan *Elaboration Likelihood Model* yang tujuannya untuk membantu peneliti melakukan analisa lebih lanjut dalam menjawab identifikasi masalah.

1.6.4. Bab IV Metodologi Penelitian

Bab ini berisi metode apa saja yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Dan juga sumber data primer dan sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

1.6.5. Bab V Pembahasan hasil Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus menjawab identifikasi masalah yang dijelaskan pada BAB I.

1.6.6. Bab VI Kesimpulan dan saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran apa saja yang diajukan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian.

